



**PILKADA SERENTAK
TAHUN 2018**



Ir. H. JOKO WIDODO
Presiden Republik Indonesia



TJAHJO KUMOLO, SH.
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia



Drs. H. M. JUSUF KALLA
Wakil Presiden Republik Indonesia

NAWA CITA **2014 - 2019**

1. MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA NEGARA
2. MEMBUAT PEMERINTAH TIDAK ABSEN DENGAN MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS, DAN TERPERCAYA
3. MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN
4. MENOLAK NEGARA LEMAH DENGAN MELAKUKAN REFORMASI SISTEM DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT DAN TERPERCAYA
5. MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA
6. MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL
7. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGERAKAN SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK
8. MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA
9. MEMPERTEGUH KE-BHINEKAKAN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL INDONESIA



PILKADA
SEHAT, JURDIL, GEMBIRA

KITA SEMUA BERSAUDARA



17 PROV. : **115** KAB. : **39** KOTA

31 PROVINSI TERLIBAT



PENCALONAN PILKADA

519

PASLON

PARTAI POLITIK

437

PERSEORANGAN

82

DASAR HUKUM

UU 10/2016
PKPU 2/2018
PKPU 3/2018

PETAHANA

159
PASLON

PROV. **13**

KAB. **104**

KOTA **42**

TUNGGAL

16
PASLON

PROV. **2**

KAB. **13**

KOTA **3**

PERSEORANGAN

82
PASLON

PROV. **3**

KAB. **60**

KOTA **19**

PEREMPUAN

KDH **50**
CALON

PROV. **2**

KAB/KOTA **48**

WKDH **45**
CALON

PROV. **5**

KAB/KOTA **40**

MASYARAKAT PEMILIH

"BELUM TERPENUHINYA TARGET PARTISIPASI PEMILIH"

DUKUNGAN PEMERINTAH

"BEBERAPA DAERAH MASIH TERKENDALA PENCAIRAN NPHD DAN DISTRIBUSI LOGISTIK"

TIM SUKSES PASLON

"FANATISME TIMSES YANG BERLEBIHAN MENGANCAM KAMTIBMAS"

MEDIA

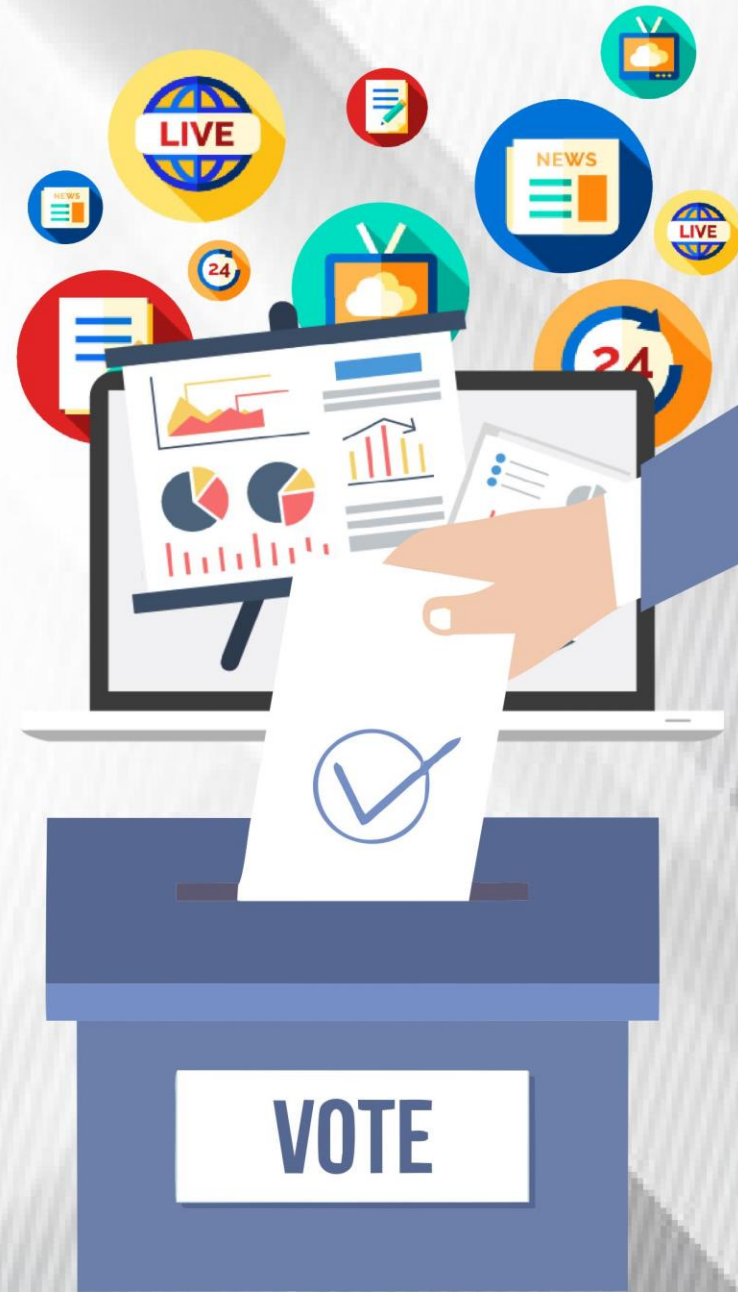
"ANCAMAN PENYEBARAN BERITA HOAX, SARA, DAN BLACK CAMPAIGN"

PERAN PETUGAS PEMUNGUTAN SUARA

"BEBERAPA PROSES REKRUITMEN PPK, PPS, DAN KPPS KURANG SELEKTIF, SEHINGGA TRANSFER PEMAHAMAN TEKNIS KURANG OPTIMAL"

DISKUALIFIKASI CALON

"DISKUALIFIKASI TERHADAP PASLON PETAHANA OLEH PENYELENGGARA, RAWAN MENIMBULKAN POTENSI KONFLIK"





PENYELENGGARAAN
(KPU)

TOTAL ANGGARAN
12.876.041.957.301
REALISASI
10.946.114.642.679



PENGAWASAN
(BAWASLU)

TOTAL ANGGARAN
3.637.005.239.187
REALISASI
3.281.570.037.897



PENGAMANAN
(PLRI-LINMAS-TNI)

TOTAL ANGGARAN
2.470.575.384.985
REALISASI
1.894.599.283.697



TOTAL ANGGARAN REALISASI
18.983.622.581.473 **13.699.708.579.288**

- KENDALA**
- RINCIAN ANGGARAN USULAN HIBAH PILKADA TIDAK DETAIL SEHINGGA PEMDA MENINGINKAN RASIONALISASI
 - **NPHD** ADANYA KONFLIK POLITIK LOKAL

KASUS

PROV. BALI Pemotongan anggaran sepihak dr pemprov, KPU dipangkas dr 229M menjadi 155M

KOTA TARAKAN Dari usulan anggaran 40 M hanya disetujui 13,6M

REALISASI SEMENTARA NPHD

<80%

80%-99%

100%

43

DAERAH

36

DAERAH

92

DAERAH

DAERAH REALISASI NPHD TERENDAH

KAB/KOTA

PROVINSI

PARIGI MOUTONG 25%

LAMPUNG 51%

KONAWE 21%

SUMATERA UTARA 46%

ROTE NDAO 20%

MALUKU UTARA 38%

DAERAH REALISASI NPHD TERTINGGI

KAB/KOTA

PROVINSI

KAYONG UTARA 100%

PAPUA 100%

NGANJUK 100%

KALIMANTAN TIMUR 100%

TUAL 100%

JAWA TIMUR 100%

SOLUSI

1

PENTINGNYA RASIONALISASI PENGUSULAN NPHD SECARA DETAIL

2

MEMPERERAT KOORDINASI ANTAR ELEMEN PENYELENGGARA DAN PENDUKUNG PILKADA



SUKET

Pengecekan Suket dan NIK yg dimohon KPU untuk di Validasi ke Disdukcapil tanggal 27 Juni 2018 sbb:

Total validasi secara nasional :

1. Nik ktp el : 574
2. Nik suket : 513

**DATA PENDUDUK
(171 DAERAH PILKADA)**

217,5 JT

**DPT PILKADA 2018
(171 DAERAH PILKADA)**

152,9 JT

PROV.

PENDUDUK	199,3 JT
DPT	141,3 JT

KAB.

PENDUDUK	70,7 JT
DPT	50,6 JT

KOTA

PENDUDUK	20,3 JT
DPT	12,8 JT

PERSOALAN TERKAIT SUKET



PERSOALAN
BLANGKO
E-KTP



KETERBATASAN
MESIN PEREKAM &
PENCETAK E-KTP

ALTERNATIF SOLUSI



MENYIAPKAN REGULASI AGAR PEMDA BISA MENYEDIAKAN MESIN PEREKAM & PENCETAK E-KTP



MEMBERI BANTUAN MESIN PEREKAM & PENCETAK E-KTP BAGI WILAYAH YANG MASIH BANYAK PENDUDUK BELUM E-KTP

NETRALITAS ASN/PNS PADA PILKADA

2.709.917 ASN PADA DAERAH PILKADA

PROV. 2.487.742 ASN
KAB. 775.045 ASN
KOTA 203.987 ASN

535 PELANGGARAN

Dari bulan Feb - Jun 2018 terdapat 535 dugaan pelanggaran netralitas ASN (Sampai H-1 Pencoblosan)

157 DUGAAN PELANGGARAN

Pada dari Hari Pencoblosan sampai tanggal 30 Juni 2018 terdapat 157 dugaan pelanggaran netralitas ASN

PERSOALAN

1

BIROKRASI RENT SEEKING & RENT SEEKER

2

BUDAYA PATERNALISTIK BIROKRASI

SOLUSI



MEMPERBERAT SANKSI BAGI ASN YG TIDAK NETRAL



MEMPERCEPAT PROSES HUKUM BAGI ASN YG DIDUGA TIDAK NETRAL

PELANGGARAN ASN TERTINGGI (PROV.) DI HARI PENCOBLOSAN



1

MALUT



2

SULTRA



3

BALI



153

ASN

Mencalonkan pada Pilkada

GUBERNUR 3
WAGUB 6
BUPATI 59
WABUP 55
WALIKOTA 18
WAWALIKOTA 12

13%



PROVINSI (GUB.)

4 PLT

2 PJS

13 PJ

KAB/KOTA (BUP./WALKOT)

35 PLT

64 PJS

109 PJ

39 PLH

PERSOALAN PJ/PJS



PJS BUPATI KERINCI

ISU KEBERPIHAKAN PJS PADA SATU PASLON & MENGAJAK PARA ASN MEMILIH PASLON TERTENTU



PJS WALKOT PANGKAL PINANG

PJS DILAPORKAN KARENA DIDUGA MENDUKUNG SATU PASLON DENGAN MENGUNDANG DI ACARA



PJS BUPATI INDRAGIRI HLR

PJS DIANGGAP TIDAK NETRAL DAN DIPERIKSA BAWASLU



PJS BUPATI SUMEDANG

RESPON PJS DIANGGAP LAMBAN MENYIKAPI SURAT KASN DENGAN MEMBIARKAN BUPATI PETAHANA MINTA DUKUNGAN ASN

IDENTIFIKASI MASALAH



PJ/PJS BANYAK YG DIAMBIL DARI PEJABAT PEMDA YANG MENEYELENGGARAKAN PILKADA DAN DIKUTI PETAHANA (ADA KAITAN PERSONAL SEBELUMNYA)

ALTERNATIF SOLUSI



HARUS ADA MEKANISME SANKSI YANG BERAT BAGI PJ/PJS YANG DIANGGAP TIDAK NETRAL



**PARTISIPASI
PILKADA 2018**
73,24%
TARGET 77,5% (-4,26%)
JUMLAH PEMILIH
MEMAKAI HAK PILIH
± 111.383.390
PEMILIH

5 PROV. TERTINGGI

	2013	2018
PAPUA	87% ▼	73%
BALI	74% ▼	72%
KALBAR	71% ▲	76%
NTT	70% ▼	63%
MALUT	70% ▲	71%

RATA-RATA 74,4% ▼ 68,8%

5 PROV. TERENDAH

	2013	2018
SUMUT	49% ▲	61%
LAMPUNG	53% ▲	71%
JATENG	54% ▲	67%
RIAU	55% ▲	59%
KALTIM	56% ▲	58%

RATA-RATA 53,4% ▲ 63,2%

DATA PENDUDUK

PROVINSI

TERTINGGI ▲

JABAR

TERENDAH ▼

MALUT

JATIM

MALUKU

JATENG

SULTRA

KABUPATEN

TERTINGGI ▲

BOGOR

TERENDAH ▼

MAMBERAMO
TENGAH

TANGERANG

SUKAMARA

GARUT

SITARO

KOTA

TERTINGGI ▲

BEKASI

TERENDAH ▼

PDG PANJANG

BANDUNG

SAWAHLUNTO

TANGERANG

SUBULUSSALAM



16
PASLON
TUNGGAL



	KAB. DELI SERDANG	
	KOTA TANGERANG	
	KAB. TANGERANG	
	KAB. PASURUAN	
	KAB. LEBAK	
	KAB. PUNCAK	
	KAB. TAPIN	
	KAB. ENREKANG	
	KAB. BONE	
	KAB. MINAHASA TENGGARA	
	KOTA PRABUMULIH	
	KAB. JAYAWIJAYA	
	KAB. PADANG LAWAS UTARA	
	KAB. MAMBERAMO TENGAH	
	KAB. MAMASA	
	KOTA MAKASSAR	



159 **PASLON**
PETAHANA



50 **CALON PEREMPUAN**
KDH **45** **CALON**
WKDH



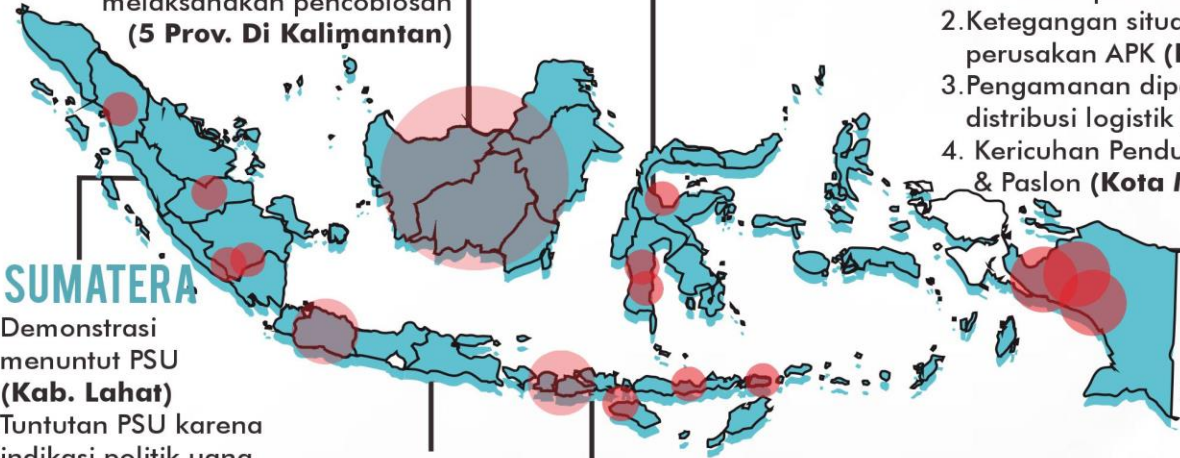
82 **PASLON**
PERSEORANGAN



PROV	0	KOTA PD. SIDEMPUAN
KAB	2	KAB. SIKKA
KOTA	1	KAB. DEIYAI

KALIMANTAN

Marak isu hoax, black campaign, dan ancaman terorisme saat melaksanakan pencoblosan (5 Prov. Di Kalimantan)



SULAWESI

1. Paslon didiskualifikasi karena terlambat 5 menit laporan audit (**Kab. Sinjai**)
2. Ketegangan situasi politik dikarenakan perusakan APK (**Kab. Sidrap**)
3. Pengamanan diperketat, rawan gangguan distribusi logistik (**Kab. Parigi Moutong**)
4. Kericuhan Pendukung Kotak Kosong & Paslon (**Kota Makassar**)

PAPUA

1. Penembakan petugas pemungutan suara (**Kab. Puncak**)
2. Penembakan di Bandara Kenyam (**Kab. Nduga**)
3. Pemecatan KPUD Nduga terkait Pilgub (**Kab. Nduga**)
4. Penundaan pencoblosan akibat putusan KPU yang hanya meloloskan 2 paslon (**Kab. Paniai**)

SUMATERA

1. Demonstrasi menuntut PSU (**Kab. Lahat**)
2. Tuntutan PSU karena indikasi politik uang (**Kab. Muara Enim**)
3. Massa Sweeping Komisioner KPU (**Kab. Tapanuli Utara**)
4. Ada black campaign (**Kota Jambi**)

JAWA

Marak black campaign (Prov. Jabar)

BALI&NUSA

1. Penembakan pelaku politik uang di Pilbup (**Kab. Nagekeo**)
2. Kedua pendukung paslon melakukan konvoi klaim kemenangan (**Kab. Alor**)
3. Diterjunkan BKO dari Polda NTT (**Kab. Sumba Barat Daya**)
4. Intimidasi saksi oleh salah satu paslon (**Kab. Sumba Barat Daya**)
5. NTB potensi kerawanan tinggi (**Prov. NTB**)

PERSONEL



POLISI

184.013



TNI

99.559



LINMAS

823.738

TOTAL 1.107.310

JUMLAH TPS

387.262 TPS

AMAN 332.520

RAWAN 1 42.233

RAWAN 2 12.509

GANGGUAN TRANTIBMAS

IDENTIFIKASI

1

Secara umum Kamtibmas aman dan terkendali.

2

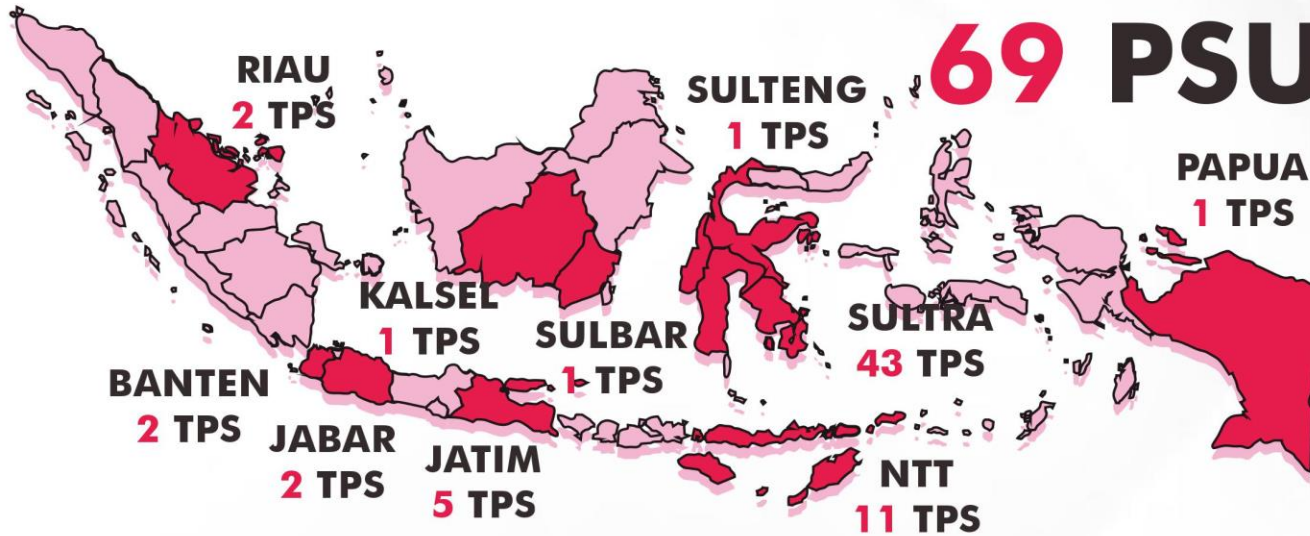
Sikap kurang tegas, tidak netral dan tidak profesional pihak penyelenggara sering menjadi pangkal sumber konflik Pilkada.

ALTERNATIF SOLUSI

- Penambahan bantuan keamanan di daerah yang memiliki potensi gangguan Kamtibmas pasca Pilkada.
- Penempatan tim dari penyelenggara pusat ke daerah untuk melakukan pendampingan di daerah rawan sengketa.
- Optimalisasi Korbinwas dari Pusat ke daerah.

PEMUNGUTAN SUARA ULANG

69 PSU



IDENTIFIKASI PSU

- PSU terjadi dikarenakan adanya kesalahan prosedur teknis pemungutan suara
- Adanya temuan penggunaan C6 yang bukan atas nama pribadi
- Melakukan pencoblosan sebanyak lebih dari satu kali
- Kesalahan perhitungan suara

KENDALA LOGISTIK



PAPUA
Kondisi Geografis
(Kab. Sarmi, Kab. Yapen, Kab. Tolikara, Kab. Yahukimo)



JABAR
Surat Suara Hilang
(Kab. Cirebon)



SULTRA
Bencana Alam
(Kab. Konawe, Kota Kendari, Kab. Konawe Selatan)



KALTIM
Kurang Surat Suara
(Kab. Penajam Paser Utara)



KALTENG
Tak Ada C1 Untuk Saksi



MALUT
Kondisi Geografis



SUMUT
Layanan Tidak Optimal

ALTERNATIF SOLUSI

- 1 Optimalisasi bimbingan teknis prosedur teknis
- 2 Penguatan pengawasan oleh Panwas
- 3 Pembatasan jumlah DPT per TPS dan menambah jumlah TPS

PEMILIHAN GUBERNUR



TAHUN POLITIK

14



TITIK KRUSIAL IRISAN PILKADA & PEMILU:

1. FASE PENETAPAN PARPOL -- FASE KAMPANYE PILKADA (FEBRUARI 2018)
2. FASE PEMUNGUTAN SUARA DAN REKAPITULASI PILKADA -- FASE PENGAJUAN CALEG (JULI 2018)
3. FASE PENETAPAN HASIL PILKADA -- FASE PENGAJUAN CAPRES-CAWAPRES DAN DCS LEGISLATIF (AGUSTUS 2018)
4. FASE ADMINISTRASI PENGESAHAN -- FASE PENGUMUMAN CAPRES, CAWAPRES, DAN DCT LEGISLATIF (SEPTEMBER 2018)
5. FASE PELANTIKAN KDH/WKDH (4 TAHAP) -- FASE KAMPANYE DAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILU (SEP 2018- JUNI 2019)

- » ALUR TAHAPAN
- TAHAPAN PILKADA 2018
- TAHAPAN PEMILU 2019
- TITIK KRUSIAL PILKADA DAN PILPRES